

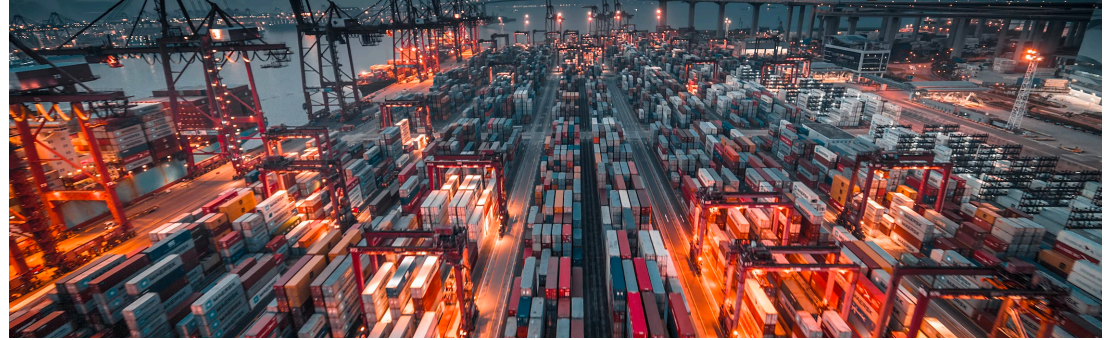
P R A K A R S A *Policy Brief*

Oktober 2022

Rantai Nilai Global Sektor Pertanian dan Perikanan di ASEAN: Jalan Panjang Menuju Inklusifitas?

Key Points:

- Partisipasi petani kecil, UMKM, pekerja, dan perempuan dalam Rantai Nilai Global komoditas minyak sawit, beras, kopi, dan perikanan di Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam masih termarginalkan dan kurang memberikan manfaat bagi mata pencaharian mereka seiring dengan tekanan lainnya.
- Di semua rantai nilai komoditas, perempuan memainkan peran penting, namun kontribusi mereka jarang diakui, dan keuntungan yang mereka peroleh pun lebih sedikit dibandingkan laki-laki.
- Pemerintah dan pelaku usaha perlu menetapkan kebijakan, peraturan, dan standar untuk memungkinkan kelompok marginal di piramida terbawah berpartisipasi dalam GVC memiliki kontribusi yang berarti dan menguntungkan.



Inklusivitas dalam Global Value Chain (GVC/Rantai Nilai Global)

Global Value Chain (GVC/Rantai Nilai Global) merupakan fenomena di mana negara berperan sebagai pemasok bahan baku, produsen produk antara, dan penyedia barang jadi (DJKPI, 2012). Dalam konteks GVC, inklusivitas terjadi ketika semua kelompok, terutama yang berada di tingkat hulu, mendapatkan keuntungan dari partisipasi mereka dalam GVC. Produsen perlu meningkatkan atau beralih ke tingkat produksi yang lebih tinggi untuk mendapatkan nilai tambah. Untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar yang mengarah pada peningkatan keuntungan, dibutuhkan lebih banyak modal, kompetensi, dan teknologi. Sayangnya, kelompok di hulu sering kali kekurangan atau tidak memiliki modal tersebut. Sehingga, '*business as usual*' atau bisnis seperti biasa' dalam GVC dapat terus menghalangi kelompok marginal ini untuk memperoleh manfaat substansial apa pun.

Kelompok marginal, seperti petani kecil, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan pekerja, terutama pekerja perempuan, memerlukan dukungan dalam hal kebijakan, peraturan, dan praktik bisnis yang menambah nilai substansial partisipasi mereka dalam GVC. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu memastikan proses GVC yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat marginal dengan mempromosikan inklusivitas bisnis di GVC.

Kelompok marginal dalam GVC minyak sawit, perikanan, beras, dan kopi di empat negara ASEAN masih mengalami kemiskinan, risiko mata pencaharian, dan kondisi kerja yang buruk

Kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan perdagangan alternatif dan akan menjadi pusat Rantai Nilai Global (GVC) di masa

mendatang (Asian Development Bank, 2021). ADB menyatakan bahwa 64% hasil ekspor dari kawasan ASEAN berkontribusi pada GVC. Hal tersebut menunjukkan kepentingan strategis wilayah ASEAN dan kontribusi besarnya terhadap GVC. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam proses GVC di ASEAN, seperti isu sosial ekonomi, ketimpangan ekonomi, serta inklusivitas rantai pasokan minyak sawit, perikanan, beras, dan kopi (ASEAN, 2019).

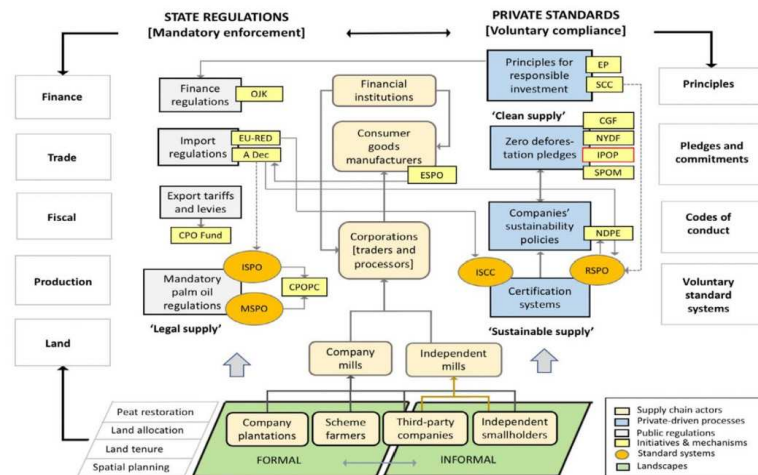
Penelitian Tax and Fiscal Justice Network in Asia (TAFJA) – Fair for All terkait minyak sawit, perikanan, beras, dan kopi di empat negara ASEAN yang disebutkan di atas (PRAKARSA, 2022) menemukan bahwa partisipasi kelompok marginal di tingkat hulu dalam GVC sering kali dirugikan. Misalnya, pada sektor minyak sawit di Indonesia, para petani dan pekerja menghadapi kemiskinan multidimensi, tidak mengetahui harga pasar, dan dibayar secara tidak adil. Petani kopi di Vietnam juga menghadapi kesulitan untuk mencapai standar kualitas industri, menghadapi berbagai pelanggaran hak-hak pekerja, termasuk pekerja anak, dan mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19. Demikian juga, petani kecil dan pekerja di Thailand dan Filipina terus menerus menghadapi volatilitas yang tinggi pada harga beras dan kesulitan mendapatkan benih maupun peralatan dengan harga terjangkau, sementara perubahan iklim mengganggu musim tanam dan panen. Di samping itu, nelayan kecil di Indonesia sering dieksploitasi oleh pedagang grosir dan pengecer tingkat menengah di samping lemahnya peraturan untuk melindungi mereka dari risiko bisnis dan pekerjaan. Pekerja perempuan di semua komoditas mengalami diskriminasi di berbagai aspek, mulai dari kurangnya pengakuan hingga pekerjaan yang dibayar rendah atau bahkan tidak dibayar. Pada keempat komoditas tersebut, partisipasi kelompok marginal dalam GVC tampaknya hanya memberikan sedikit nilai dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka.

Minyak sawit di Indonesia: tata kelola industri yang kompleks dan jalan panjang menuju hak atas pekerjaan yang layak

Minyak sawit merupakan bagian penting dari pasar minyak nabati global, di mana Indonesia dan Malaysia menyumbang

84% dari total produksi minyak sawit dunia (ourworldindata.org). Pada tahun 2021, Indonesia memproduksi 44,5 juta metrik ton minyak sawit dan menyumbang 59% dari total produksi minyak sawit dunia dan nilai ekspor sebesar 17,4 miliar dolar AS pada tahun 2021 (Statista, 2022).

Gambar 1. Kebijakan, peraturan, dan lembaga yang mengelola sektor minyak sawit dari tingkat global hingga daerah di Indonesia



Sumber: Pacheco, et.al., 2017

Kompleksitas jaringan tata kelola minyak sawit yang berdampak bagi kelompok tingkat hulu ditunjukkan dalam rezim sertifikasi minyak sawit. Indonesia memiliki standar sertifikasi sendiri, yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sementara itu, konsumen di negara maju (UE, AS, dan Inggris) mengadopsi standardisasi internasional, Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO). Akibatnya, petani kecil di tingkat hulu harus mengalokasikan anggaran ganda sebagai prasyarat pengadaan teknis RSPO maupun ISPO. Pada saat yang sama, partisipasi mereka dalam ISPO dan RSPO tidak meningkatkan akses mereka ke pasar yang lebih luas dan rentan terhadap volatilitas harga.

Para pekerja sering kali dihadapkan dengan kondisi kerja yang buruk, misalnya bekerja dengan kontrak yang tidak jelas atau bahkan tanpa kontrak. Penelitian PRAKARSA sebelumnya (2021) menemukan bahwa beberapa perusahaan sering melanggar hak-hak pekerja dengan membayar pekerja mereka di bawah upah minimum, tidak memiliki langkah-langkah menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja, membatasi kebebasan berserikat pekerja, dan terkadang menggunakan sistem kerja paksa. Pekerja pertanian harus bekerja dan memenuhi target perusahaan yang tinggi, sehingga melibatkan perempuan dan anak-anak guna meningkatkan hasil panen. Umumnya, pekerja tambahan di sektor ini tidak dibayar karena upah hanya diberikan kepada pekerja utama (laki-laki dewasa dalam keluarga). Dalam beberapa kasus, anak-anak di bawah umur juga dilibatkan. Dalam kasus lain, perusahaan menyewa tanah dari masyarakat adat namun tidak mendapat bagi hasil atas penggunaan tanah.

Lebih lanjut, meskipun pekerja perempuan terlibat secara substansial dalam proses produksi, pekerjaan mereka sering kali diremehkan. Para perempuan juga bekerja sebagai pekerja lepas untuk membantu suami mereka tanpa kontrak dengan perusahaan perkebunan (PRAKARSA, 2021). Diskriminasi gender juga dapat dilihat dalam aspek produktif dan

reproduktif. Perempuan termarginalkan, dibayar rendah atau bahkan tidak dibayar. Hak-hak reproduksi perempuan juga sering tidak diperhatikan dan dipenuhi, seperti saat menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Perempuan juga mengalami diskriminasi struktural, pekerja perempuan menjadi sasaran kekerasan, terutama oleh pasangannya dan tidak tersentuh oleh penegakan hukum. Perempuan menghasilkan pendapatan tetapi tidak memiliki kendali atas pendapatan rumah tangga (PRAKARSA, 2021).

Perikanan di Indonesia: rendahnya modal dan perlindungan dari risiko, serta adanya peraturan yang menghambat

Ikan dan produk perikanan menjadi semakin penting sebagai sumber protein utama bagi penduduk global, terutama bagi mereka yang berada di kawasan Asia Tenggara. Beberapa negara Asia Tenggara menjadi salah satu produsen ikan dan produk perikanan tertinggi di dunia.

Nelayan berskala kecil dan tradisional merupakan aktor yang paling rentan dalam rantai nilai komoditas perikanan. Para nelayan ini kekurangan sumber daya dan modal. Dimana akses permodalan terbatas karena bank lebih tertarik memberikan kredit ke industri pengolahan ikan daripada ke industri perikanan tangkap atau budi daya. Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya infrastruktur, teknologi, dan peralatan, misalnya pelabuhan, kapal peti kemas, dan sistem rantai dingin, seperti cool box, pabrik es, dan cold storage. Akibatnya, nelayan tidak memiliki daya tawar untuk memilih pasar hasil tangkapannya, sehingga berakibat pada rendahnya pendapatan.

Pekerja dan nelayan kecil tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan, jam kerja, upah standar, dan asuransi. Di sisi lain, nelayan besar dan pemberi kerja kesulitan mengakses pembiayaan, memperoleh pembayaran atas produk yang

diperdagangkan, dan mendapatkan perizinan karena kebijakan administrasi pemerintah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan terbatas dan hanya mendapatkan retribusi dari kegiatan pelelangan ikan yang cenderung berada di bawah rata-rata dibandingkan dengan nilai ekonomi kegiatan perikanan. Pemerintah pusat membebani nelayan dengan adanya beberapa peraturan, seperti pembatasan kuota, kegiatan ekspor, wilayah penangkapan, alat tangkap, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan kewenangan terbatas, Pemerintah daerah juga tidak mampu memberikan kemudahan kepada nelayan dalam hal pembayaran, sehingga muncul kasus utang dagang yang berlarut-larut. Meski arus kas menjadi salah satu poin penting dalam pekerjaan rutin ini, para nelayan tidak mendapat bantuan khusus dari pemerintah, di mana subsidi yang diharapkan tidak sesuai dengan target.

Kopi di Vietnam: hambatan dalam program peningkatan dan tantangan pekerjaan yang layak

Kopi merupakan komoditas terbesar kedua (setelah minyak) di dunia yang diperdagangkan. Vietnam merupakan pengekspor kopi terbesar kedua dalam hal volume setelah Brazil, dengan ekspor biji kopi sebanyak 22,45 juta karung berukuran 60 kilogram pada tahun 2020-2021 (Statista, 2022).

Terdapat daya tawar yang tidak setara di antara para pelaku rantai nilai komoditas kopi. Penyangrai berperan sebagai pelaku utama (30%) karena mereka tidak hanya mampu menghasilkan margin laba tertinggi tetapi juga mendapatkan nilai terbesar di seluruh rantai nilai. Harga dan kualitas kopi di tingkat hulu sebagian besar ditentukan oleh penyangrai dan pembeli akhir. Di samping fluktuasi iklim dan cuaca, kurangnya modal dan sarana teknologi juga menjadi alasan petani tingkat hulu mengalami kesulitan dalam memenuhi standar kualitas dan meningkatkan produksi mereka.

Gambar 2. Vietnam dalam Rantai Nilai Global Komoditas Kopi



Sumber: PRAKARSA, 2022

Produsen kopi, petani, dan pekerja di perkebunan kopi yang berada di tingkat hulu pun masih mengalami kondisi kerja yang buruk. Petani kopi yang merupakan bagian fundamental bagi industri kopi dibayar rendah dan memiliki banyak batasan dalam menggunakan hak mereka untuk berserikat dan tawar-menawar secara kolektif dengan pelaku yang lebih besar. Di samping itu, masih terdapat anak-anak yang bekerja di perkebunan kopi untuk membantu orang tua dan keluarga, sehingga hal tersebut mengganggu pendidikan mereka. Sekitar 60% sampai 80% dari total pekerja anak di Vietnam ditemukan di sektor pertanian, termasuk kopi. Lebih dari itu, sektor kopi di Vietnam masih jarang sekali menggunakan peralatan pelindung, di mana bahan kimia pertanian banyak

digunakan dan berpotensi mengekspos para pekerja terhadap risiko kesehatan.

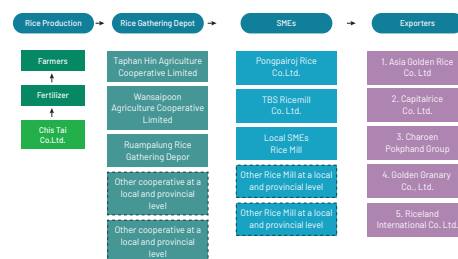
Perempuan yang bekerja di tingkat hulu terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan, namun dibayar lebih rendah daripada rekan laki-laki mereka. Sebagian besar perempuan bertugas memelihara pohon kopi dan memetik buah saat panen, sedangkan laki-laki bertugas menyangrai kopi. Untuk pekerjaan yang sama, perempuan sering kali memperoleh pendapatan yang lebih rendah dibanding laki-laki. Misalnya, dalam pekerjaan memanen, pekerja perempuan menerima upah sekitar 180.000 Dong Vietnam hingga 230.000 Dong Vietnam, sedangkan pekerja laki-laki dapat menerima upah hingga sekitar 300.000 Dong Vietnam. Contoh lain dalam pekerjaan menyangrai, di mana pekerja laki-laki menerima upah sekitar 500.000 Dong Vietnam hingga 700.000 Dong Vietnam, sedangkan pekerja perempuan hanya menerima upah sekitar 400.000 Dong Vietnam hingga 500.000 Dong Vietnam. Perbedaan upah semacam ini menciptakan ketimpangan upah berbasis gender.

Beras di Thailand dan Filipina: posisi tawar petani yang rendah, kemiskinan yang berkepanjangan, dan tekanan perubahan iklim

Beras merupakan salah satu makanan terpenting dalam rantai makanan manusia, terutama bagi orang Asia. Perdagangan beras menyumbang 0,16% dari total perdagangan dunia (OEC, 2020). Pada tahun 2020, Thailand menjadi pengekspor beras terbesar ke-2 di dunia karena telah berhasil mengekspor beras senilai 3,88 miliar dolar AS (OEC, 2022). Pada tahun yang sama, Filipina menjadi pengekspor beras terbesar ke-83 di dunia atas ekspor beras senilai 889 ribu dolar AS (OEC, 2020).

Pelaku sektor pertanian beras di tingkat hulu adalah petani, sedangkan pelaku di tingkat hilir meliputi pabrik penggilingan, pengepul beras, pedagang eceran, broker, dan pengekspor. Petani tidak hanya terlibat dalam proses penanaman, tetapi juga dalam proses penentuan jenis peralatan, pupuk, dan penyiangan yang dilakukan secara manual sekaligus dalam setiap tahapan produksi beras (Othman, 2012).

Gambar 3. Pemangku Kepentingan pada Rantai Nilai Komoditas Beras di Thailand



Source: PRAKARSA, 2022

Rantai komoditas beras dikendalikan dan dikoordinasi, dan para pelaku sektor ini memiliki kekuasaan yang tidak setara. Petani tidak memahami harga beli pedagang dan hampir tidak memiliki posisi tawar terhadap pengepul atau pengusaha. Ketika harga beras menurun, petani terpaksa menjual produknya dengan harga rendah atau terpaksa dibayar dengan harga yang ditentukan oleh pembeli. Ketika harga ekspor beras rendah, perusahaan menunda pembelian beras dari petani dengan berbagai alasan, misalnya perusahaan belum mampu menyediakan transportasi untuk mengangkut beras. Pada saat petani menjual beras, perusahaan masih berkenan membelinya

dengan harga yang disepakati. Namun, jika kelembapan yang menyebabkan berkurangnya berat beras maka perusahaan menurunkan harga beli karena beras tersebut tidak memenuhi standar kualitas yang disepakati sebelumnya. Dan jika pedagang tersebut tetap menjual dengan harga lebih tinggi, maka petani akan mendapat denda karena telah melanggar kontrak (pembayaran uang muka untuk input yang dilampirkan dalam kontrak), dan dapat kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan pada musim berikutnya.

Tingginya angka kemiskinan di antara petani kecil berkaitan erat dengan pekerjaan mereka dalam pertanian padi. Kemiskinan di Filipina sebagian besar ditemukan dalam sektor pertanian. Kontribusi sektor tersebut terhadap Gross Domestic Product (GDP) terus menurun (15% pada tahun 2009 menjadi 9% pada tahun 2019). Petani dan nelayan menyumbang angka kemiskinan tertinggi di antara sektor primer di Filipina, yaitu masing-masing sebesar 31,6 persen dan 26,2 persen (Kementerian Pertanian, 2021). Selama lockdown wilayah akibat pandemi COVID-19, kondisi petani semakin memburuk. Meski demikian, sebagian besar penduduk miskin masih mempertahankan rumah tangga pertanian.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam konsep GVC, inklusivitas terjadi ketika semua kelompok, terutama yang berada di tingkat hilir, memperoleh manfaat dari proses produksi. Dapat disimpulkan bahwa di antara empat komoditas di empat negara, GVC belum inklusif karena distribusi kekuasaan dan manfaat yang tidak merata bagi kelompok yang terlibat di sepanjang rantai. Dalam banyak kasus, karena sektor pertanian dan perikanan merupakan rantai nilai yang digerakkan oleh pembeli, pemerintah cenderung lebih peduli dalam hal memastikan agar permintaan pembeli dan pemilik modal besar terpenuhi sehingga dapat memperlancar mekanisme pasar, daripada meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak kelompok marginal di tingkat hulu. Para pelaku perantara dan perusahaan di tingkat menengah dan hilir juga masih fokus memastikan pasokan bahan baku dari petani kecil, UMKM, pekerja, dan perempuan di tingkat hulu, tanpa upaya lebih lanjut dalam meningkatkan modal, sarana

produksi, serta kesejahteraan dan standar kerja para pekerja.

Di bawah ini adalah beberapa rekomendasi bagi pemerintah sebagai regulator dan institusi pengawas dalam proses rantai nilai yang adil:

1. Pemerintah harus meningkatkan akses kelompok marginal untuk berpartisipasi secara substansial dalam GVC, misalnya dengan merumuskan peraturan untuk memberdayakan petani lokal, nelayan, atau UMKM agar memasuki rantai pasok dengan mendukung peningkatan kemampuan mereka. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus melindungi kelompok ini dari dampak negatif pasar dan eksternalitas, misalnya dengan memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan terhadap risiko pekerjaan (misalnya nelayan) atau asuransi gagal panen bagi petani padi dan kopi.
2. Komunitas pengusaha di tingkat menengah maupun hilir harus mematuhi kebijakan dan peraturan mengenai hak-hak pekerja dan standar hidup sekaligus memastikan partisipasi yang bermakna dan bermanfaat dari para kelompok marginal dalam rantai nilai mereka. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendorong prinsip-prinsip bisnis inklusif dalam praktik bisnis mereka, misalnya memperlakukan para pelaku bisnis, seperti pemasok, karyawan, dan pelanggan, dengan hormat sebagai mitra bisnis.
3. Organisasi masyarakat sipil (OMS) di negara-negara dengan pendapatan kecil/negara berkembang bersama rekan mereka di negara-negara maju dan berkuasa harus bekerja sama memantau bagaimana kelompok dominan dalam GVC menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas terhadap kelompok marginal dalam rantai nilai.
4. Pemerintah dan komunitas pengusaha harus memiliki kebijakan sensitif gender dalam GVC yang diutamakan ke dalam proses bisnis. Kebijakan tersebut harus diterapkan secara adil dan kontekstual hingga tingkat terbawah, seperti produsen kecil atau petani kecil, terutama perempuan, yang menanggung konsekuensi ketidaksetaraan gender dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Penanggungjawab Pelaksana:

Ah Maftuchan
The PRAKARSA Executive Director

Ditulis oleh :

- Herni Ramdhaningrum
- Eka Afrina Djamhari

Diulas oleh:

Victoria Fangidae

Didesain oleh:

Bambang Nurjaman

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bumbu I Blok A No.8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798
perkumpulan@theprakarsa.org

The PRAKARSA adalah institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **PRAKARSA Policy Brief** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

References

- Asian Development Bank. (2021). https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/00_gvc_dev_report_2021_e.pdf
- ASEAN. (2019). *Global Value Chains in ASEAN A Regional Perspective*. https://www.asean.or.jp/en/wp-content/uploads/sites/3/GVC_A-Regional-Perspective_Paper-1-Revised_2019_full_web.pdf
- Department of Agriculture. (2021). *Farmers and Fishers: the stalwart sectors*. <https://saad.da.gov.ph/2021/05/farmers-and-fishers-the-stalwart-sectors>
- OECD. (2020). *Rice*. <https://oec.world/en/profile/hs/rice>
- OECD. (2022). *Rice in Thailand*. <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/rice/reporter/tha#:~:text=Exports%20In%202020%2C%20Thailand%20exported,most%20exported%20product%20in%20Thailand.>
- Othman, Z. (2012). *Information and communication technology innovation as a tool for promoting sustainable agriculture: a case study of paddy farming in West Malaysia*. Faculty of Science University of Malaya: Kuala Lumpur.
- Pacheco, P., Gnych, S., Dermawan, A., Komarudin, H., & Okarda, O. (2017). *The palm oil global value chain: Implications for economic growth and social and environmental sustainability*. In *The palm oil global value chain: Implications for economic growth and social and environmental sustainability*. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/006405>
- PRAKARSA. (2021). *Pelanggaran Hak Buruh Perkebunan Sawit: Studi Kasus Di Kalimantan Barat Dan Sulawesi Tengah*. Perkumpulan PRAKARSA.
- PRAKARSA. (2022). *Tracking Global Value Chains (GVCs) on Palm Oil, Fisheries, Rice and Coffee Commodities in Indonesia, Thailand, The Philippines, and Vietnam*. Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta.
- Statista. (2022). Palm oil top global producers 2021
- Statista. (2022). *Global coffee industry*. <https://www.statista.com/statistics/268135/ranking-of-coffee-exporting-countries/>